PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

(Studi Pada Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan

Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial

OLEH :

LISKA INTAN SARI
1805905010031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT
Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Liska Intan Sari
NIM : 1805905010031

Dengan judul: **Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong (Studi Pada Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Najamudin, S.E, M. Si
NIDN.00140772009

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP.199005122019032 02

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT
Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Liska Intan Sari
NIM : 1805905010031

Dengan judul: **Peran Pemerintah Gampong Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong (Studi Pada Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 28 Juni 2022.

Menyetujui,

Komisi Ujian

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Najamudin, S.E, M.Si	.....
2. Anggota	: Zuhrizal Fadhly, SE., M.Si	.....
3. Anggota	: Sri Wahyu Handayani, MA	.....

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP.199005122019032 02

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liska Intan Sari

Nim : 1805905010031

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan

Liska Intan Sari

NIM. 1805905010031

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kepada keridhaan Allah SWT atas karunia yang telah Engkau berikan, nikmat sehat serta nikmat kecerdasan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan benar. Shalawat beserta salam penulis sanjung-sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong" ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi/tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai kendala dan kesulitan. Tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan ini dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati yang sangat dalam dan ketulusan hati ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan semangat baik secara moril, maupun materil kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Margiono beserta Ibunda tercinta Sapriati yang telah memberikan kasih sayang tiada batas dan dorongan motivasi serta do'a tulusnya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Najamudin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE, MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Basri, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

6. Ibu Safrida, M. AP dan Ibu Agatha Debby Reiza Marcella M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si, selaku dosen penguji I dan Ibu Sri Wahyu Handayani, MA, selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi ini.
8. Sahabatku, Vera Masnida Nandar, Lisa Ulandari, Yelly Sardika, Susi Ayuli, Suci Fonna, Pinda Putri, dan Fanny Inayah yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I program studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Meulaboh, 16 Maret, 2022

Penulis,

(Liska Intan Sari)

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penentuan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah belum maksimal tetapi beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong. Adapun peran Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan masyarakat di gampong yaitu sebagai fasilitator yaitu memberikan alat/bahan bantuan modal kepada pada para petani dan peternak, memotivasi kelompok tani dan peternak, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan, pembimbing dan pengarah untuk para petani, sehingga masyarakat gampong dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas atau peralatan, serta pinjaman macet

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Gampong, Pemberdayaan Masyarakat.*

ABSTRACT

The problem studied in this study is how the role of the village government in empowering the Gunong Tarok village community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency and what factors influence the role of the Gampong Government in empowering the Gunong Tarok village community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency. The purpose of this study was to determine the role of the gampong government in empowering the Gunong Tarok gampong community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency and to find out what factors influence the role of the gampong government in empowering the Gunong Tarok gampong community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency. The research method used in this study is a qualitative method with descriptive research type and the determination of informants in the study can use purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation.

From the results of this study, it was found that the role of the gampong government in empowering the Gunong Tarok gampong community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency was not maximized but he in his own way invited the community to play an active role in every community empowerment program in the village. The role of the Gunong Tarok village government in empowering the community in the village is as a facilitator, namely providing tools/materials for capital assistance to farmers and ranchers, motivating farmer groups and breeders, supervisors and implementers in the distribution of assistance, mentors and directors for farmers, so that the community gampongs can benefit from community empowerment. Factors that influence the role of the village government in empowering the Gunong Tarok village community, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency are the lack of community participation, lack of facilities or equipment, and bad loans.

Keywords: *The Role of Gampong Government, Community Empowerment.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ..... **iii**
LEMBARAN ORISINALITAS ..... **iv**
LEMBARAN PERSEMBAHAN ..... **v**
LEMBARAN KATA PENGANTAR ..... **vi**
LEMBARAN ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.4.1. Manfaat Teoritis 5
1.4.2. Manfaat Praktis 6
1.5. Sistematika Penulisan 6

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu 8
2.2. Peran Pemerintah Desa 11
2.2.1. Pengertian Peran 11
2.2.2. Pengertian Pemerintah Desa 12
2.2.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 14
2.3. Pemberdayaan Masyarakat 21
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 22
2.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 23
2.3.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat 25
2.3.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 27
2.3.5. Prinsip Dasar Pemberdayaan 28
2.3.6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 31
2.4. Teori Actors 32

III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian 34
3.2. Metode Penelitian 34
3.3. Batasan Penelitian 34
3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian 35
3.5. Sumber Data Penelitian 36
3.6. Teknik Pengumpulan Data 37
3.7. Teknik Penentuan Informan 38
3.8. Instrumen Penelitian 39

3.9. Teknik Analisis Data 39
3.10. Uji Kredibilitas Data 40

IV. HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat ……..... 42
4.2. Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat …….……..... 50
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat …….…..……. 65

V. PEMBAHASAN
5.1. Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat …….……..... 69
5.2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat …….…..……. 72

VI. PENUTUP
6.1. Kesimpulan …….…..... 4
6.2. Saran ……..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. SK Penguji

Lampiran 5. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Biodata Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan sebagai wilayah otonomi dan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam penjelasan dari undang-undang dasar tahun 1945. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat harus diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Regara republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintahan gampong harus menyelenggarakan urusan Pemerintah oleh Pemerintah gampong dan badan permusyawaratan gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (Nellis, 2019, h. 2).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka (20), Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Di samping itu gampong juga sebagai sub Pemerintahan paling bawah yang menyelenggarakan administrasi Negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang gampong. Pasal 1 angka (1), gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa/gampong merupakan lembaga perpanjangan tangan Pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/gampong dan keberhasilan pembangunan Nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah desa/gampong, yang mengatur tentang Pemerintahan desa/gampong, sehingga roda Pemerintahan berjalan dengan optimal (Yeilan, 2016, h. 1).

Pemerintah gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga Mukim (Ismail, 2012, h. 6).

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas (Ita, 2019, h. 890-891).

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kunci pemberdayaan meliputi, proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktif nya pihak yang diperdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Endang, 2021, h. 192).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya (Reinaldo, 2017, h. 2).

Gampong Gunong Tarok memiliki luas lahan pesawahan gampong serta perkebunan, harusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi warga gampong, namun pada kenyatannya masih banyak di temukan masyarakat yang di kategorikan

sebagai masyarakat miskin. Dikarenakan warga masyarakat belum bisa memanfaatkan lahan pertanian yang ada di wilayahnya sendiri secara baik, itu semua di sebabkan karena pola pikir masyarakat yang masih menggunakan cara betani yang tradisional, maka peran Pemerintah gampong Gunong Tarok untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan program pemberdayaan salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat gampong Gunong Tarok. Sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda Pemerintahan, maka Pemerintah gampong Gunong Tarok melaksanakan pemberdayaan masyarakat gampong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang "Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan yang berkaitan dengan peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat gampong.
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khusunya ilmu adminitrasi Negara.

1.4.2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat memberi pengetahuan mengenai peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan tentang peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkannya nanti agar masyarakat dapat memahami lebih luas mengenai peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.

d. Bagi Peneliti Lain

Tersedianya informasi dasar serta landasan awal untuk para peneliti berikutnya terhadap mereka-mereka yang menganggap masalah peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong ini menarik untuk diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimulai dari :

BAB I : Pendahuluan, pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, penulisan dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, dalam Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil penelitian, dalam Bab ini membahas yang menyangkut tentang penelitian serta relevansi dengan landasan teori.

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah desa dalam memberdayaan masyarakat desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi

dan pelatihan border, akan tetapi dalam melaksanakaan upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan (Ita Ulumiyah, dkk 2019, h. 890).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit dengan judul "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman".

   Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala desa, kabag umum, kabag kemasyarakatan, ketua PKK, ketua karang taruna, ketua BPD, Kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan tringulasi teknik atau metode, sumber data dan waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung adalah pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indikator peranan Kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan Kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipasif yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat

mengarah pada pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung peranan Kepala desa adalah keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat peranan Kepala desa adalah kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Kepala desa dengan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalaui koordinasi secara partisipasif dari masyarakat sehingga peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif (Sigit, 2015, h. 122).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andini dengan judul "Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh".

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah gampong seperti Keuchik, Tuha Peut Gampong, Kasi Kesejahteraan serta Pemerintah gampong lainnya sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun masyarakat gampong jarang dilibatkan dalam hal perencanaan sehingga masyarakat gampong kurang berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada gampong Lhong Raya. Mekanisme pengelolaan pembangunan

infrastrukturnya yaitu melalui tahapan-tahapan antara lain perencanaan pembangunan sebelum dilaksanaan suatu pembangunan di gampong. Perencanaan pembangunan gampong dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh Pemerintah gampong Lhong Raya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong akan tetapi masyarakat gampong jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan gampong. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah gampong sudah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, namun dari pihak masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong (Andini, 2010, h. 73).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian.

2.2. Peran Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyaraka (KBBI, 2009, h. 540).

Menurut Rivai (2004, h. 148) peran merupakan prilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada

kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja sesorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Merton dalam Raho (2007, h. 67) mengatakan bahwa peran adalah suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang berada pada status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Maka dapat disimpulkan bahwa perangkat peran adalah sub-sub yang kemudian membentuk atau menciptakan kelengkapan hubungan-hubungan yang didasarkan pada peran yang dimiliki oleh orang dikarenakan menduduki status-status sosial khusus.

Bedasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai rangkaian perilaku yang berhubungan dengan norma-norma yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang penting bagi kelangsungan struktur baik dalam lembaga maupun masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan walaupun berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan kewajibannya. Apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya.

2.2.2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu

sistem keterlibatan di dalam masyarakat, sehinnga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat moden yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran Pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Karbulah, 2018, h. 95).

Pemerintah desa pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong dan mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim (Ismail, 2012, h. 6).

Pemerintah desa/gampong merupakan lembaga perpanjangan tangan Pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/gampong dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah desa/gampong, yang mengatur tentang Pemerintahan desa/gampong, sehingga roda Pemerintahan berjalan dengan optimal (Yeilan, 2016, h. 1).

Berdasarakan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.2.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Fungsi Pemerintas desa adalah menyelenggarakan seperti tata praja Pemerintahan, penetapan pertaturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasana pendesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta ksehatan. Pemerintah Desa mengsosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, Pemerintah desa juga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Serta tugas Pemerintahan desa yang lain di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Rusyan 2018, h. 70).

Penyelenggaraan Pemerintah desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi Pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok Pemerintahan desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas, kewajiban, wewenang serta tanggung jawab Pemerintah desa yang bersangkutan.

a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5) Membina kehidupan masyarakat desa.
6) Membina ekonomi desa.
7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan.
9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b. Sekertaris

1. Tugas pokok sekretaris adalah membantu Kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah desa.
2. Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut:
   a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala desa.
   b) Melaksanakan tugas Kepala desa dalam hal Kepala desa berhalangan.

c) Melaksanakan tugas Kepala desa apabila Kepala desa diberhentikan sementara).

d) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.

e) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa.

c. Kepala Urusan Umum (KAUR)

1. Tugas pokok, membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.

b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.

d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

e) Pengelolaan administrasi perangkat desa.

f) Persiapan bahan-bahan laporan dan.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris desa.

d. Kaur Keuangan

1. Tugas pokok adalah membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.

2. Fungsi :

   a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.

   b) Persiapan bahan penyusunan APB desa.

   c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris desa.

e. Kaur Pemerintahan

   1. Tugas pokok adalah membantu Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

   2. Fungsi :

      a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.

      b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala desa.

      c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.

      d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.

      e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa.

      f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

      g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

f. Kaur Pembangunan

1. Tugas pokok adalah membantu Kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
   a) Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan
   b) Pengelolaan tugas pembantuan.
   c) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa.

g. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas pokok adalah membantu Kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
   a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
   b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragam.
   c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
   d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

1. Tugas :

   a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala desa dalam wilayah kerjanya.

   b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

   c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat.

   d) Membantu Kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya.

   e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa.

2. Fungsi :

   a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun.

   b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

   c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.

   d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.

   e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala desa.

i. BPD (Badan Perwakilan Desa)

1. Tugas :

   a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa.

c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa.

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

f) Menyusun tata tertib BPD.

2. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

3. Hak :

a) Meminta keterangan kepada Pemerintah desa.

b) Menyatakan pendapat kewajiban.

c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.

e) Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional sera keutuhan NKRI.

f) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

g) Memproses pemilihan Kepala desa

h) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

i) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

j) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dengan adanya tugas dan fungsi Pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sehingga terdapat koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Artinya bahwa Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama. Para Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di Pemerintahan desa maupun oleh masyarakat setempat.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2006, h. 59).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakanya (Rosmedi, 2006, h. 18).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003, h. 169).

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kunci pemberdayaan meliputi, proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktif nya pihak yang diperdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Endang, 2021, h. 192).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004, h. 43). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Sulistiyani (2004, h. 24) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Suharto, 2005, h. 66-67).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan, dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Perbaikan diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat

2.3.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006, h. 59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Endang, 2021, h. 196). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasasmita (2019, h. 23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empoewering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empoewering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

2.3.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodingningrat (2004, h. 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179).

Menurut Sulistiyani (2004, h. 83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, h. 3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penyadaran pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).
b. Pengkapasitaan sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan sistem nilai.
c. Pendayaan pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat melalui yaitu melalui tahap penyadaran dan dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan

kapasitas diri, pengkapasitasan, dan pendayaan, pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2.3.5. Prinsip Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Sutrisno dalam Ita, 2019, h. 892) ada lima macam, yaitu:

a. Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
b. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
c. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
d. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
e. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, pasrtisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005, h. 54), adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan "*the have not*", melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little*". Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang

bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar pemberdayaan adalah prinsip kesetaraan, prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Keswadayaan atau kemandirian, prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain.

2.3.6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memang sebuah proses. Namun, dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita

dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Kusnadi (2006) mengemukakan, indikator pemberdayaan, yaitu :

a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara

2.4. Teori Actors

Teori "Actors" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien,

mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi (Maani, 2011).

Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “Actors” antara lain terdiri dari:

A = *Authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan.

C = *Confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan).

T = *Trust* (keyakinan).

O = *Oppurtinities* (kesempatan).

R = *Responsibilities* (tanggung jawab).

S = *Support* (dukungan).

Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “Actors” adalah sebagai berikut (Maani, 2011):

a. *Authority,* kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
b. *Confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
c. Trust, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.
d. Oppurtunities, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

e. Responsibilities, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.

f. Support, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Kerja Actors tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Di mana Pemerintah dan organisasi non Pemerintah sebagai aktornya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif *(descriptive research),* yaitu suatu penyelidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa kini yang sesuai dengan keadaan menurut judul pembahasan, dan masalah yang dijelaskan adalah hal-hal yang masih hidup dan berkembang (Arikunto, 2006). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti (Husen, 2005).

3.3. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan penelitian meliputi :

a. Penelitian ini hanya dilakukan di gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

b. Peneliti melakukan penelitian hanya pada bagaimana peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini lebih kurang menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	**Kegiatan**	**Tahun 2021-2022**					
		10	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**
Tahap I							
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Observasi Awal						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Konsultasi						
5.	Perbaikan						
6.	Seminar Proposal						
7.	Perbaikan						
Tahap II							
8.	Penelitian Lapangan						

9.	Pengolahan Data						
10.	Analisis Data						
Tahap III							
11.	Penulisan Hasil						
12.	Konsultasi						
13.	Seminar Hasil						
14.	Perbaikan						
Tahap IV							
15.	Sidang						

3.5. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesoiner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein, 2009). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu narasumber atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala gampong, Kaur Pemberdayaan, Tuha Peut dan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekundar ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Arikunto, 2014). Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok pembahasan penelitian ini. Akan tetapi mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka dilakukan metode pengumpulan data antara lain :

3.6.1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan, dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat kepermasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan (Arikunto, 2014). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang pemberdayaan di gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

3.6.2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat

mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban siswa akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya (Sukardi, 2011). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala gampong, Kaur Pemberdayaan, Tuha Peut dan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2009). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil penelitian.

3.7. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang dalam latar belakang penelitian. Fungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Informan penelitian yaitu narasumber yang diyakini mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang diteliti, bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti dapat memilih sendiri informan berdasarkan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Rukin, 2019).

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Gampong Gunong Tarok	1 Orang
2.	Kaur Pemberdayaan	1 Orang
3.	Tuha Peut	3 Orang
4.	Masyarakat	6 Orang
	Jumlah Informan	11 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti

3.8. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri atau *human instrument* (Sugiyono, 2015). Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang fleksibel serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian itu sendiri atau dengan kata lain tidak dapat dipastikan hasilnya. Maka dalam hal ini peneliti itulah yang menjadi instrument kuncinya guna mengontrol ketidakpastian tersebut menuju hasil yang ingin diraih.

3.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut menurut (Sugiyono, 2012) :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

   Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

   Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3.10. Uji Kredibilitas Data

Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data rersebut. Trianggulasi dibagi menjadi empat:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamatan diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Pengunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Membercek

Mengulangi garis besar apa yang diungkapkan oleh informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta menambah apabila terdapat beberapa kekurangan. Tahap ini dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

1. Sejarah Gampong Gunong Tarok

Gampong Gunong Tarok merupakan sebuah gampong yang berada di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kecamatan Pante Ceureumen yaitu 487,55 km2 dengan kepadatan 21,86 jiwa/km2. Jumlah penduduk sebanyak 11486 jiwa, terdiri dari 5865 laki-laki dan 5621 perempuan yang terbagi dalam 2083 Kepala Keluarga (KK). Kecamatan Pante Ceureumen terdiri dari 25 gampong /kelurahan dengan batas kecamatan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XVI
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panton Reu
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya

Topografi wilayah Kecamatan Pante Ceureumen antara lain 10 gampong berada di dataran tinggi dan 15 desa berada di lembah/daerah aliran sungai dengan ketinggian rata-rata 20-80 meter diatas permukaan laut. Jenis penggunaan lahan antara lain 2916 hektar lahan persawahan, 11469 hektar bukan sawah, dan 34640 hektar lahan non pertanian.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Gunong Tarok

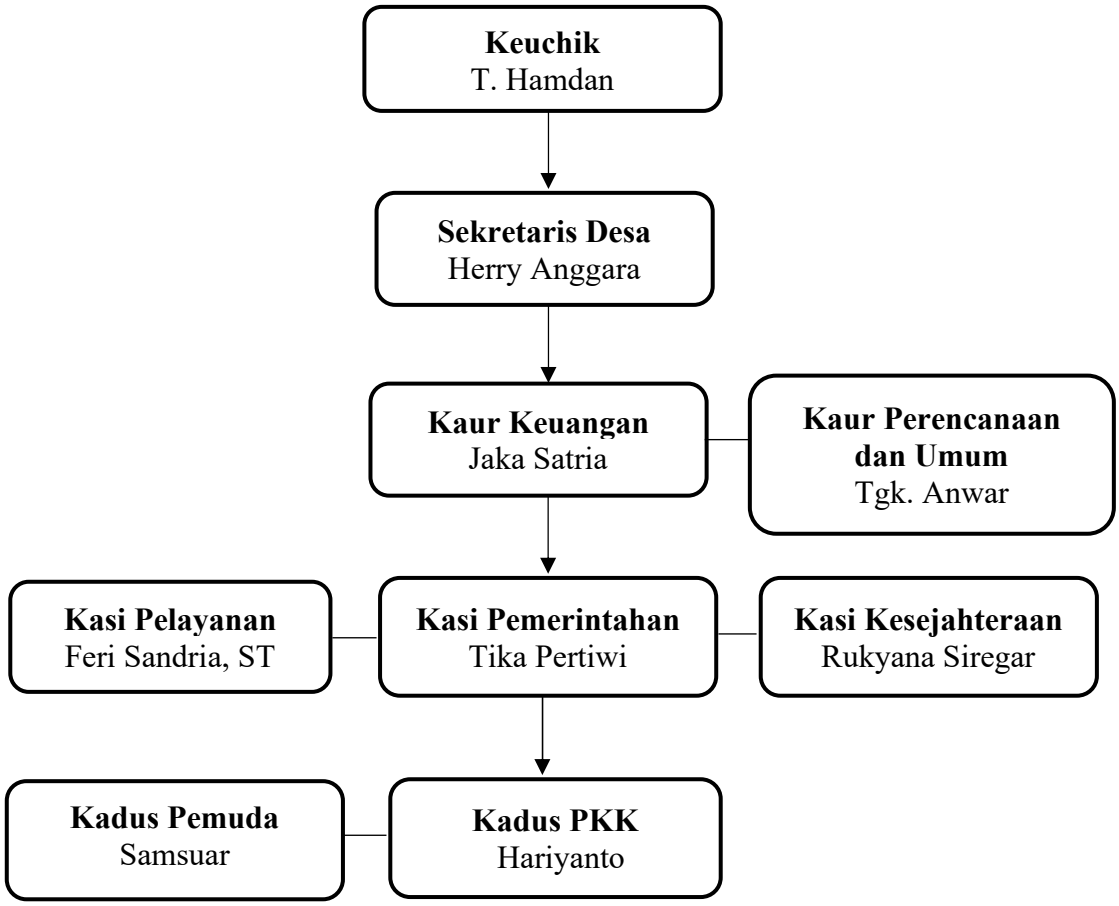

3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Gampong Gunong Tarok

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan Pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan gampong
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan gampong mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5. Membina kehidupan masyarakat gampong.
6. Membina ekonomi gampong.
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah desa.
2. Fungsi :
   - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala desa
   - Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
   - Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
   - Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan desa
   - Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa
   - Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
   - Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
   - Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
   - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
   - Pengelolaan administrasi perangkat desa
   - Persiapan bahan-bahan laporan; dan
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris desa.

d. Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.
2. Fungsi :
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
   - Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris desa.

e. Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
   - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
   - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala desa
   - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
   - Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi desa
   - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
   - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
   - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

f. Kaur Ekonomi Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Fungsi :
   - Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
   - Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan
   - Pengelolaan tugas pembantuan; dan
   - Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa.

g. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala ddesa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
   - Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
   - Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
   - Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
   - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

1. Tugas :
   - Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
   - Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi :
   - Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
   - Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
   - Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
   - Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
   - Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

4. Visi dan Misi Gampong Gunong Tarok

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi gampong Gunong Tarok saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa/Gampong (RPJMG), maka untuk pembangunan gampong Gunong Tarok pada periode 6 (enam) tahun ke depan (Tahun 2019-2025), disusun

visi sebagai berikut**:** “Terwujudnya desa Gunong Tarok sebagai gampong yang mandiri berbasis pertanian, perkebunan, dan usaha Mikro untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Gampong yang mandiri berbasis pertanian dan perkebunan

   Mengandung pengertian bahwa masyarakat gampong Gunong Tarok mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat gampong lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang perkebunan secara luas.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat

c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian gampong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kuaiitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dengan daya saing yang lebih baik.
d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perkebunan dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

4.2. Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Kepala gampong merupakan pimpinan tertinggi di gampong. Oleh karena itu kepala gampong bertanggung jawab penuh atas roda Pemerintahan yang ada di gampong. Selain pemimpin dalam roda Pemerintahan, Kepala gampong juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di gampong. Salah satu

konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Di gampong Gunong Tarok terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik gampong dan pembangunan non-fisik. Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok, bapak TH yaitu :

> "Program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan talut/ irigasi persawahan, jalan-jalan kampung. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pertanian dan peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong atau Tuha Peut, pemberdayaan perempuan dan lain-lain. Tapi selama adanya Covid-19 ini di gampong Gunong Tarok hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan dikarenakan karena kekurangan dana gampong, dana gampong sudah kita pergunakan untuk bantuan Covid-19" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Program pemberdayaan masyarakat di gampong ini sebenarnya banyak karena terkendala dana makanya sekarang hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan saja dan karena mayoritas penduduk disini bertani dan beternak" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut gampong Gunong Tarok mengatakan bahwa:

> "Hampir sebahagian besar penduduk di gampong ini bermata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak dan program pemberdayaan yang ada di gampong ini sekarang hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Gampong Gunong Tarok wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayahnya adalah lahan pertanian maka hampir sebahagian besar penduduk di gampong ini bermata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak dan sekarangpun karena kendala di dana maka program pemberdayaan yang ada di gampong ini sekarang hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Hampir sebahagian besar penduduk di gampong ini bermata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak dan sekarang terkendala dana dan Covid-19 maka program pemberdayaan yang ada di gampong ini sekarang hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan serta pertanian dan peternakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi" (Hasil Wawancara Rabu, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong ini meliputi pertanian dan peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong atau Tuha Peut, pemberdayaan perempuan dan lain-lain, serta hampir sebahagian besar penduduk di gampong ini bermata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak. Tapi selama adanya Covid-19 ini di gampong Gunong Tarok hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan dikarenakan karena kekurangan dana gampong, sekarang dana gampong sudah dipergunakan untuk bantuan Covid-19.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok, adapun yang dilakukan Pemerintah Gunong Tarok dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

> "Adapun yang saya lakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah saya memilih masyarakat dengan tepat untuk dijadikan sasaran pemberdayaan, menetapkan tujuan sesuai permasalahan masyarakat, menetapkan aturan, agar masyarakat wajib ikut serta membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan melakukan evaluasi tiap program pemberdayaan masyarakat usai" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Adapun yang dilakukan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemerintah harus memilih masyarakat dengan tepat untuk dijadikan sasaran pemberdayaan agar pemberdayaan itu berjalan dengan semestinya, menetapkan tujuan sesuai permasalahan masyarakat, menetapkan aturan, agar masyarakat wajib ikut serta membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, serta Pemerintah melakukan evaluasi tiap program pemberdayaan masyarakat itu selesai, guna untuk melihat berhasil apa tidak pemberdayaan tersebut" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Berdasarkan pernyataan di atas, adapun yang dilakukan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pertama Pemerintah memilih masyarakat dengan tepat untuk dijadikan sasaran pemberdayaan, menetapkan tujuan sesuai permasalahan masyarakat, menetapkan aturan, agar masyarakat wajib ikut serta membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan melakukan evaluasi tiap program pemberdayaan masyarakat usai. Pemerintah gampong berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Adapun peran Pemerintah dalam pemberdayaaan masyarakat menurut Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok adalah sebagai berikut :

> "Peranan Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan kelompok tani ini adalah dengan menjadi penyandang dana yaitu memberikan bantuan dana dan bantuan lainnya, menjadi motivator yaitu melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani, menjadi fasilitator dengan memberikan berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada para petani

seperti alat-alat pertanian dan terakhir menjadi monitor yang mengawasi kelompok tani" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Adapun peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah Pemerintah gampong sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pemberdayaan pertanian. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut mengatakan bahwa:

> "Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah Pemerintah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada masyarakat serta melakukan pelatihan-pelatihan melalui penyuluhan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkemampuan" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku tokoh anggota Tuha Peut gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Pemerintah dalam pemberdayaan kadang memberikan motivasi kepada masyarakat dan teman-temn petani hanya pada saat ada pelatihan dan kegiatan yang mereka lakukan Selebihnya kadang ketemu di warung saling cerita, belum lesuh karena harga padi naik turun, perawatan harus ekstra, Pemerintah desa ya kayak pak kades selalu bilang tetap sabar jangan berkecil hati. Hal seperti itu kadang membuat saya sebagai masyarakat tetap semangat selain tuntutan hidup yang semakin banyak, anak sekolah biaya makan. Sekarang semua serba mahal. Dengan motivasi yang kami dapatkan itu, yah sedikit banyaknya tetap membuat kami semangat" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Peranan Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan kelompok tani ini adalah dengan memberikan bantuan, menjadi motivator yaitu melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani, menjadi fasilitator dengan memberikan berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada para

> petani seperti alat-alat pertanian dan terakhir menjadi monitor yang mengawasi kelompok tani" (Hasil Wawancara Rabu, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Berdasarkan pernyataan di atas adapaun peran Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di gampong yaitu sebagai fasilitator, pemberian informasi pada kelompok tani, memotivasi kelompok tani, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan, pembimbing dan pengarah untuk para petani.

Pemerintah gampong maupun daerah dalam pertanian memberikan fasilitas/bantuan pertanian yaitu berupa bantuan kepada masyarakat petani seperti benih, pupuk dan alat sarana produksi lainnya. Untuk para peternakan diberikan bibit-bibit ternak di setiap anggota kelompok untuk di kelola dan di dimanfaatkan sesuai kebutuhannnya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok yang mangatakan bahwa :

> "Dalam kelompok tani ini Pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sedangkan untuk para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu masyarakat yang terdaftar sebagai kelompok tani tersebut karena harga pupuk, obat-obatan dan bibit lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian pupuk secara bebas dipasaran, tetapi pembagian selalu bergilir tidak terus menerus bergantian dengan kelompok tani yang lain" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Untuk kelompok tani ini Pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sedangkan untuk para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing, tetapi pembagian selalu bergilir tidak terus menerus bergantian dengan kelompok tani yang lain" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut gampong Gunong Tarok mengatakan bahwa:

> "Kepada para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing. Sedangkan untuk kelompok tani ini Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk, obat, alat semprot, modal, dan bibit" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Adapun bantuan yang diberikan Pemerintah kepada para peternak diberikan modal serta bibit ternak seperti anak kambing. Sedangkan untuk kelompok tani ini Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk, obat, alat semprot, modal, dan bibit, tetapi pembagian selalu bergilir tidak terus menerus bergantian dengan kelompok tani yang lain" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Untuk kelompok tani ini Pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sedangkan untuk para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing" (Hasil Wawancara Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu PA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Saya sebagai kelompok tani pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit serta modal untuk membeli keperluan lainnya" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu SI selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

> "Saya sering mendapatkan bantuan, adapaun bantuannya berupa pupuk ada dua jenis NPK dan Urea, bibit padi, alat semprot dan juga mendapatkan modal. Alhamdulillah bisa mengurangi biaya saya dalam bertani ini" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu SI selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

> "Saya sebagai ketua kelompok tani itu memang sudah sering mendapat bantuan pupuk, bibit, alat semprot dan alat pertanian lainnya" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu MA selaku tokoh masyarakat mengatakan :

> "Saya kelompok tani disini beberapa kali mendapat bantuan pupuk, bibit, alat semprot atau alat petani lainnya serta mendapatkan juga modal untuk membantu uasaha tani saya" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak SA selaku tokoh masyarakat mengatakan :

> "Saya sebagai kelompok tani pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit serta modal untuk membeli keperluan lainnya" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak UD selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Saya sebagai kelompok tani pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit, dan mendapatkan bibit ternak seperti kambing, serta modal untuk menunjang usaha saya" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Pemberian bantuan dari Pemerintah dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dirasakan petani yang membutuhkannya. Dikarenakan pembagian selalu bergilir tidak terus menerus dengan penjelasan bergantian dengan kelompok tani yang lain. Adapun bantua yang diberikan Pemerintah adalah obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sedangkan untuk para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing dan lain sebagainya. Dalam pemberian bantuan modal kepada para petani tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok yang mangatakan bahwa :

> "Kami menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus berdomisili masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya dengan persenan yang kecil yaitu 1 % dalam jangka 1 tahun dari dana yang telah di pinjam kepada BUMG. Persenan tersebut digunakan untuk dana keuntungan jasa dan PAD yang dikembalikan ke unit usaha keuangan BUMG agar tidak mengalami kerugian hal ini dapat menutupi jika anggota tidak bisa membayar pada waktu yang telah di tetapkan" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus berdomisili masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya dengan persenan yang kecil yaitu 1 % dalam jangka 1 tahun dari dana yang telah di pinjam kepada BUMG" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut mengatakan bahwa:

> "Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus mempunyai KK dan KTP masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus berdomisili masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus mempunyai KK masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya" (Hasil Wawancara Rabu, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu PA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Saya sebagai kelompok tani mendapatkan modal dari BUMG dengan mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Pemerintah gampong Gunong Tarok, cara saya mengembalikan modal tersebut dengan mengangsur setiap bulannya" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu SI, SR, dan MA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Saya sebagai kelompok tani mendapatkan modal dari BUMG dengan mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Pemerintah gampong Gunong Tarok, cara saya mengembalikan modal tersebut dengan mengangsur setiap bulannya dengan jangka waktu 1 tahun" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak SA dan UD selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Kami mendapatkan modal dari BUMG untuk mengembangkan usaha tani kami, dengan mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Pemerintah gampong Gunong Tarok, cara saya mengembalikan modal tersebut dengan mengangsur setiap bulannya" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus berdomisili masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar

dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya dengan persenan yang kecil yaitu 1 % dalam jangka 1 tahun dari dana yang telah di pinjam kepada BUMG.

Modal BUMG merupakan dana anggaran dari Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah gampong untuk membantu perekonomian masyarakat di gampong Gunong Tarok, adapun nama BUMG dan program kerjanya yang ada di gampong Gunong Tarok, hal ini disampaikan oleh Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok yang mangatakan bahwa :

> "BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut mengatakan bahwa:

> "BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3

hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

"BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

"BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Rabu, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu PA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

"BUMG gampong Gunong Tarok bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas adapun BUMG yang ada di gampong Gunong Tarok adalah bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan tahun 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022. Adapun kapan dimulai dana gampong dan berapa besar dana/anggaran yang digunakan Pemerintah gampong untuk pemberdayaan pertanian dan peternakan tahun di tahun 2022, hal ini disampaikan oleh Bapak TH selaku Kepala gampong Gunong Tarok yang mangatakan bahwa :

> "Dana gampong dimulai sesuai dengan Permendagri No. 6 dana gampong tahun 2016. Dan pada tahun 2022 kami menyediakan dana untuk pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan adalah sebesar 126.800.000,00" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan bahwa:

> "Dana gampong dimulai sesuai dengan Permendagri No. 6 dana gampong tahun 2016. Pemerintah menyediakan anggaran pendapatan belanja gampong pada tahun 2022 untuk pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan sebesar 126.800.000,00" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku ketua Tuha Peut mengatakan bahwa:

> "Dana gampong dimulai sesuai dengan Permendagri No. 6 dana gampong tahun 2016. Yang saya ketahui dari baliho anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG) gampong Gunong Tarok pada tahun 2022 adalah sebesar 126.800.000,00. Untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanian dan peternakan" (Hasil Wawancara Sabtu, 12 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Dana gampong dimulai sesuai dengan Permendagri No. 6 dana gampong tahun 2016. Untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan yang saya ketahui dari baliho anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG) gampong Gunong Tarok pada tahun 2022 adalah sebesar 126.800.000,00" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Dana gampong dimulai sesuai dengan Permendagri No. 6 dana gampong tahun 2016. Pemerintah menyediakan anggaran pendapatan belanja gampong pada tahu 2022 untuk pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan sebesar 126.800.000,00." (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu PA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Saya mendapatkan modal bantuan dari Pemerintah sebesar 5.000.000,00, itu saya gunakan untuk membeli bibit ternak lagi" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak SA, UD, dan Ibu SI selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Kami mendapatkan modal dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha kami sebesar Rp. 2.000.000,00" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu SR dan MA selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Kami mendapatkan modal dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha kami sebesar Rp. 5.000.000,00 ada juga yang mendapatkannya dibawah kami tergantung juga berapa banyak/luas dari usaha kami" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas Pemerintah menyediakan dana modal untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan berasal anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG) gampong Gunong Tarok pada tahun 2022 adalah sebesar 126.800.000,00 dan dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp.2.000.000,00 sampai 5.000.000,00 per orang.

4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang kepala gampong mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini diungkapkan oleh bapak TH selaku Kepala desa Gunong Tarok mengatakan :

> "Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehinga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pinjaman macet, kendala yang dihadapi oleh desa muncul setelah para peminjam modal tersebut tidak mengembalikan pinjaman atau pinjaman macet. Pemerintah gampong tidak bisa berbuat banyak oleh karena itu bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet maka untuk tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi pinjaman pemberdayaan tersebut. Akibat dari tidak baiknya aliran modal mengakibatkan desa mengalami kerugian karena tidak maksimalnya bantuan desa secara merata" (Hasil Wawancara Jum'at, 11 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak NU selaku Kaur Pemberdayaan mengatakan:

> "Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, contohnya saja saat ada penyuluhan pertanian yang diberikan oleh dinas pertanian daerah, warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya seperti orang berpidato. Sehingga warga desa kurang tertarik dan memahami. Beda jika menggunakan fasilitas seperti laptop karena bisa langsung dilihat materinya dan bisa ditampilkan jenis-jenis hama dan cara pengolahan sawahnya. Jadi fasilitas dan peralatan sangat mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat" (Hasil Wawancara Senin, 14 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak MU selaku Ketua Tuha Peut mengatakan bahwa:

> "Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pinjaman macet, karena selain bantuan berupa infrastruktur, Pemerintah gampong juga memiliki program pinjaman kepada masayarakat. Pinjaman ini berupa pinjaman berjangka dan tanpa bunga. Dengan adanya pinjaman yang ringan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin meminta bantuan dari gampong. Kendala yang dihadapi oleh gampong muncul setelah para peminjam modal tersebut tidak mengembalikan pinjaman atau pinjaman macet. Pemerintah dan aparatur gampong tidak bisa berbuat banyak oleh karena itu bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet maka untuk tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi pinjaman pemberdayaan tersebut dan harus melunasinya dulu serta disalurkan kemasyarakat lain" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak US selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah mungkin kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kepala gampong, hal ini karena warga gampong cenderung tidak perduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan Pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat" (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak SA selaku anggota Tuha Peut di gampong Gunong Tarok menyatakan bahwa :

> "Kurangnya fasilitas, karena fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan gampong dengan baik, contohnya saja saat ada penyuluhan pertanian yang diberikan oleh dinas pertanian daerah, warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya seperti orang berpidato" (Hasil Wawancara Rabu, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu PA, SI selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kadang kalau ada rapat masyarakat malas untuk pergi, akan tetapi kalau diberikan uang itu baru masyarakat rame-rame mau datang" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:00).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak SA, UD, dan selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> "Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, karena msyarakat sibuk sendiri dengan aktifitasnya" (Hasil Wawancara Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 11:00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu SR dan MR selaku tokoh masyarakat mengatakan:

> “Faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ialah adanya masyarakat yang mengalami pinjaman macet, hal tersebut dikarenakan kurangnya hasil panen masyarakat yang membuat masyarakat lebih mengedepankan kebutuhannya dan mungkin membuat Pemerintah gampong rugi karena uang itukan harus bergilir” (Hasil Wawancara Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12:00).

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat faktor fasilitas atau peralatan teknologi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pemberdayaan. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat menurun.

Faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas atau peralatan, serta pinjaman macet. Pemerintah dan aparatur gampong tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat yang mengalami pinjaman macet oleh karena itu bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet maka untuk tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi pinjaman pemberdayaan tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Kepala gampong merupakan pimpinan tertinggi di gampong. Oleh karena itu kepala gampong bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di gampong. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, Kepala gampong juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di gampong. Kepala gampong adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan Pemerintahan gampong, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Di gampong Gunong Tarok terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong ini meliputi pertanian dan peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong atau Tuha Peut, pemberdayaan perempuan dan lain-lain, serta hampir sebahagian besar penduduk di gampong ini bermata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak. Tapi selama adanya Covid-19 ini di gampong Gunong Tarok hanya ada pemberdayaan pertanian dan peternakan dikarenakan karena

kekurangan dana gampong, sekarang dana gampong sudah dipergunakan untuk bantuan Covid-19.

Adapun yang dilakukan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pertama Pemerintah memilih masyarakat dengan tepat untuk dijadikan sasaran pemberdayaan, menetapkan tujuan sesuai permasalahan masyarakat, menetapkan aturan, agar masyarakat wajib ikut serta membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan melakukan evaluasi tiap program pemberdayaan masyarakat usai. Pemerintah gampong berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Adapaun Peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah sudah baik karena beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Adapun peran Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan masyarakat di gampong yaitu sebagai fasilitator yaitu memberikan alat/bahan bantuan modal kepada pada para petani dan peternak, memotivasi kelompok tani dan peternak, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan, pembimbing dan pengarah untuk para petani, sehingga masyarakat gampong dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberian bantuan dari Pemerintah dapat telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dirasakan petani yang membutuhkannya. Dikarenakan pembagian selalu bergilir tidak terus menerus dengan penjelasan bergantian dengan kelompok tani yang lain. Adapun bantua yang diberikan Pemerintah adalah obat-obatan,

pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sedangkan untuk para peternak diberikan bibit ternak seperti anak kambing dan lain sebagainya.

Pemerintah menyalurkan bantuan modal dari BUMG gampong Gunong Tarok untuk para petani dan peternak, dengan syarat harus berdomisili masyarakat gampong Gunong Tarok, melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan dan setiap peminjam dari BUMG mereka dapat membayar dengan cara menganggsur pada setiap bulan nya dengan persenan yang kecil yaitu 1 % dalam jangka 1 tahun dari dana yang telah di pinjam kepada BUMG. Adapun jumlah masyarakat penerima pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penerima Pemberdayaan

No	Nama Usaha	Jumlah Penerima Pemberdayaan
1.	Usaha Pertanian	150 KK
2.	Usaha Peternakan	120 KK

Adapun BUMG yang ada di gampong Gunong Tarok adalah bernama BUMG Wong Deso, berdiri sejak Januari 2018. Program kerja nya adalah usaha pertanian dan peternakan, 2021/2022, penyertaan modal untuk pembelian sawit 3 hektar tahun 2020/2021, dan penguatan ketahanan pangan di tahun 2022. Pemerintah menyediakan dana modal untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan berasal anggaran pendapatan belanja gampong (RAPBG) gampong Gunong Tarok pada tahun 2022 adalah sebesar 126.800.000,00 dan dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp.2.000.000,00 sampai 5.000.000,00 per orang.

5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala gampong mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di gampong, memberi ide atau gagasan.

b. Kurangnya fasilitas atau peralatan

Untuk melaksanakan tugasnya, Pemerintah gampong membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor gampong dalam menunjang terselenggaranya Pemerintahan gampong dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

c. Pinjaman macet

Selain bantuan berupa infrastruktur, Pemerintah gampong juga memiliki program pinjaman kepada masayarakat. Pinjaman ini berupa pinjaman berjangka dan tanpa bunga. Dengan adanya pinjaman yang ringan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin meminta bantuan dari gampong. Kendala yang dihadapi oleh gampong muncul setelah para peminjam modal tersebut tidak mengembalikan pinjaman atau pinjaman macet. Pemerintah dan aparatur gampong tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat yang mengalami pinjaman macet oleh karena itu bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet maka untuk tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi pinjaman pemberdayaan tersebut dan akan disalurkan ke masyarakat lain.

.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah belum maksimal tetapi beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong. Adapun peran Pemerintah gampong Gunong Tarok dalam pemberdayaan masyarakat di gampong yaitu sebagai fasilitator yaitu memberikan alat/bahan bantuan modal kepada pada para petani dan peternak, memotivasi kelompok tani dan peternak, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan, pembimbing dan pengarah untuk para petani, sehingga masyarakat gampong dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas atau peralatan, serta pinjaman macet.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Gampong

   Hendaknya Kepala gampong lebih meningkatan perannya dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Gunong Tarok semakin berkembang dan agar warga masyarakat gampong lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.

2. Kepada Masyarakat

   Hendaknya masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan karena masyarakat merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukmianto. 2002. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,* Jogjakarta: Gava Media.

Endang, Hermawan. 2021. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat",* Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1 Juni 2021.

Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Gunawan, Sumodiningrat. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Husen, Umar. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh,* Aceh: Majelis Adat Aceh.

Ita, Ulumiyah, Abdul,. Juli Andi Gani., & Lely, Indah Mindarti. 2019. *Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang),* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.

Karbulah, Yaya., & Aliyudin. 2018. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani,* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 3, Nomor 1.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartasasmita. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.

Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.

Maani, Karjuni Dt. 2011. *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 10 (1): 53-66.

Nellis, Mardhiah. 2019. *Optimalisasi Pemerintah Daerah Nagan Raya dalam Memberikan Pemahaman Kepada Aparatur Gampong Mengenai Undang-Undang Desa*, Jurnal Public Policy.

Reinaldo, Rumlus Johny Lumolos,. & Michael Mantiri, 2017. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat),* Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 9 No 2.

Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa,* Jakarta: Bumi Aksara.

Rosmedi. 2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D,* Bandung: Alfabeta.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raho. 2007. *Pemerintahan Desa,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sigit Suwardianto. 2015. *Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,* Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sikardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya,* Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian,* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta.

Uswatun, Andini. 2020. *Peran Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elek Media Komputindo.

Yeilan, Stasia Aler. 2016. *Peran Aparatur Desa dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara,* Jurnal Administrasi Unsrat.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

(Studi Pada Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat)

A. Kepala Desa

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Gunong Tarok?
2. Apa yang dilakukan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Apa peran Pemerintah dalam pemberdayaaan masyarakat?
4. Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah desa kepada petani?
5. Dalam pemberian bantuan modal kepada para petani tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui, yaitu apa saja?
6. Dari gampong berapa besar dana/anggaran yang dunakan untuk pemberdayaan?
7. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?

B. Kaur Pemberdayaan

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Gunong Tarok?
2. Apa yang dilakukan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Apa peran Pemerintah dalam pemberdayaaan masyarakat?
4. Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah desa kepada petani?
5. Dalam pemberian bantuan modal kepada para petani tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui, yaitu apa saja?
6. Dari gampong berapa besar dana/anggaran yang dunakan untuk pemberdayaan?
7. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?

C. Tuha Peut

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Gunong Tarok?
2. Apa peran Pemerintah dalam pemberdayaaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah desa kepada petani?
4. Dalam pemberian bantuan modal kepada para petani tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui, yaitu apa saja?
5. Dari gampong berapa besar dana/anggaran yang dunakan untuk pemberdayaan?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?

D. Tokoh Masyarakat

1. Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah desa kepada petani?
2. Dalam pemberian bantuan modal kepada para petani tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui, yaitu apa saja?
3. Dari gampong berapa besar dana/anggaran yang dunakan untuk pemberdayaan?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Hasil Dokumentasi Kepala Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Kaur Pemberdayaan Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Dengan Masyarakat

Hasil Dokumentasi Ketua Tuha Peut Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Anggota Tuha Peut Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Anggota Tuha Peut Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Masyarakat Gampong Gunong Tarok

Hasil Dokumentasi Masyarakat Gampong Gunong Tarok

Dokumentasi Anggaran Dana Gampong 2022

Dokumentasi Anggaran Dana Gampong 2022

Lampiran 3: SK Pembimbing

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 281/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Liska Intan Sari NIM 1805905010031
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Liska Intan Sari NIM 1805905010031 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU

[illegible] Sari NIM 1805005010033 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.

KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

Basri, SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 4: SK Penguji

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 467/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILM U SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditetapkan dewan penguji skripsi mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentng Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU...

... Fadhly, M.Si sebagai penguji I dan Sri Wahyu Handayani, MA sebagai penguji II mahasiswa nama Lidia Intan Sari NIM 1803905010071

KEDUA : Dewan penguji bertugas sebagai penelaah seminar proposal dan pengup sidang akhir skripsi

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dewan penguji bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar

KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 26 November 2021
a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Basri,SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 5: Surat Permohonan Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 445 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth.
Keuchik Gampong Gunong Tarok Kec. Panta Ceureumen Kab. Aceh Barat
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Liska Intan Sari
NIM	: 1805905010031
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
No. Hp	: 081361781423
Dosen Pembimbing	: Najamudin, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyareng, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 6: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
GAMPONG GUNONG TAROK
KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
Sekretariat : Jalan Meulaboh – Panta Ceureumen Km 30 Kode Pos 23681

Gunong Tarok, 21 Maret 2022

Nomor : 070 /028/III/GT/AB/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yang terhormat,
Sdr. LISKA INTAN SARI
Di –
Meulaboh

1. Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Nomor : 67/UN59.5/PT.01.05.2022 Perihal ***Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data Untuk Skripsi*** pada Mahasiswa :

Nama	: **LISKA INTAN SARI**
Nim	: 1805905010031
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Nomor Hp	: 0813 6178 1423
Dosen Pembimbing	: **NAJAMUDIN, M.Si**

2. Dengan ini Keuchik Gampong Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, Memberikan Izin kepada Saudara/i LISKA INTAN SARI Untuk Melakukan Wawancara Penelitian dan Pengumpulan Data yang diperlukan di Gampong Gunong Tarok.

3. Demikian surat balasan ini kami sampaikan, Terima kasih

KEUCHIK GAMPONG GUNONG TAROK

T. HAMDAN

Lampiran 7: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama	:	Liska Intan Sari
Nim	:	1805905010031
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gunong Tarok, 24 Maret 2000
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Gunong Tarok Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat
Email	:	liskaintansari@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah	:	Margiono
b. Ibu	:	Sapriati
c. Alamat	:	Desa Gunong Tarok Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat

Pendidikan yang telah ditempuh

a. SD	:	SD Negeri Gunong Tarok (2006-2012)
b. SMP/MTSN	:	SMP Negeri 2 Pante Ceureumen (2012-2015)
c. SMA/MAN	:	SMA Negeri 3 Meulaboh (2015-2018)
Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar (2018 s.d Selesai)